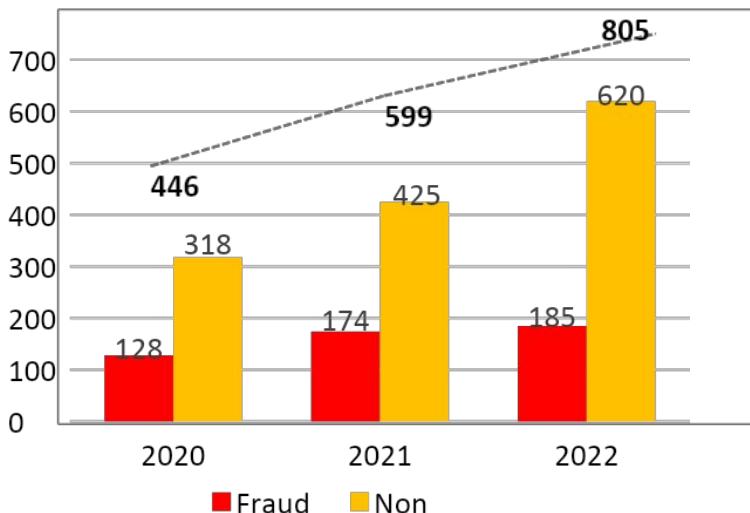
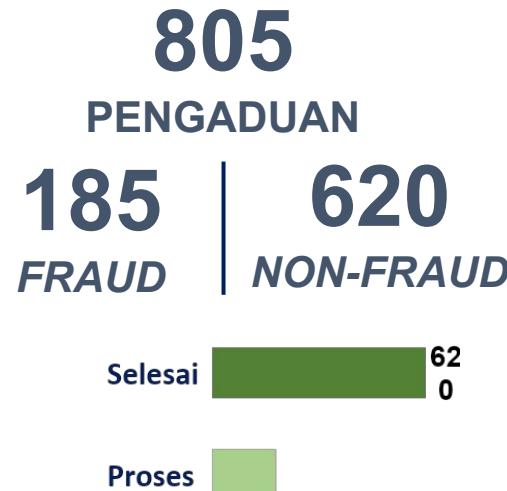


# JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA

## Jumlah Pengaduan 2020 – 2022



Per 31 Des 2022



1. Tren jumlah pengaduan di 2022 tertinggi pada periode 3 thn belakang.
2. Di satu sisi, ini indikasi keberhasilan sosialisasi WISE kepada *stakeholders*.
3. Di sisi lain, jajaran manajemen, UKI, dan ITJEN harus lebih waspada dalam mengawasi jajaran dalam pelaksanaan probis.

### Kategori pengaduan *Fraud* terbanyak 2022:

1. Pada tahun 2022, tercatat terdapat 805 pengaduan yang masuk melalui saluran WISE dimana jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi semenjak pengelolaan pengaduan melalui WISE dimulai di tahun 2011. Jumlah tersebut naik sebanyak 34,4% dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebanyak 599 pengaduan.
2. Berdasarkan jenis pengaduan, sejumlah 620 pengaduan (77,1%) adalah pengaduan *Non-Fraud* sedangkan 185 pengaduan (22,9%) adalah pengaduan *Fraud*. Pengaduan *Non-Fraud* mengalami peningkatan signifikan sebesar 45,8% dibandingkan tahun 2021 sejumlah 425 pengaduan, sedangkan pengaduan *Fraud* mengalami peningkatan sebesar 6,3% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 174 pengaduan.
3. DJP masih menjadi unit dengan jumlah pengaduan *Fraud* tertinggi sejumlah 93 pengaduan, diikuti oleh DJBC sejumlah 53 pengaduan, dan DJPB sejumlah 13 pengaduan. Sedangkan untuk kategori *Non-Fraud*, LPDP merupakan unit tertinggi dengan jumlah 195 pengaduan, diikuti oleh DJP (170 pengaduan), DJPB (62 pengaduan), dan DJKN (60 pengaduan).

# GAMBARAN UMUM DAN JENIS PELANGGARAN

## Gambaran Umum Pelanggaran

Wishtleblowing System (WISE) Kementerian Keuangan merupakan saluran komunikasi yang bertujuan untuk menampung informasi terkait dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan layanan kepada masyarakat, serta pencegahan terjadinya kecurangan (fraud) yang melibatkan para pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

## Jenis Pelanggaran

1. Fraud, antara lain berupa penyalahgunaan wewenang, pemerasan, suap, gratifikasi (10%) dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Non Fraud, antara lain berupa pelanggaran atas pelayanan, pelanggaran prosedur, kehadiran bekerja, melalaikan kewajiban suami/istri/KDRT, dan pelanggaran administrasi kepegawaian.